



Proses pencairan Bantuan Sosial Tunai di Desa Patalan, Jetis, Bantul, Selasa (9/6).

KR-Sukro Riyadi

KELELAHAN, NY MARDINAH MENINGGAL Antre Bansos Makan Korban

BANTUL (KR) - Pencairan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Patalan Kecamatan Jetis Bantul makan korban, Selasa (9/6). Ny Mardinah (60) warga Ngaglik Desa Patalan Kecamatan Jetis Bantul meninggal ketika sedang antre untuk mengambil BST tersebut. Hasil pemeriksaan diketahui korban mempunyai riwayat penyakit hipertensi.

Kapolsek Jetis, AKP M Sholeh SH MM, mengatakan peristiwa memilukan tersebut bermula ketika korban pagi itu datang ke Balai Desa Patalan untuk menerima bantuan BST.

Setelah sampai di balai desa, korban mengambil tempat duduk bersama warga penerima lain dan menunggu antrean. Namun tanpa diduga tiba-tiba korban jatuh dan pingsan.

Melihat peristiwa itu, warga lain bersama bersama anggota Babinkamtibmas Desa Patalan Bripta Fajar Prihandoko memberikan pertolongan dengan membawa ke Puskesmas Jetis II. Kemudian korban ditangani dokter, tapi ketika diberikan pertolongan sudah tidak ada denyut nadi dan dinyatakan meninggal.

M Sholeh mengatakan, merujuk keterangan pihak Puskesmas korban dinyatakan meninggal akibat hipertensi. Kesimpulan tersebut diperkuat dari keterangan keluarga korban. "Selain itu korban ditengarai kelelahan ketika berangkat ke balai desa dan belum sempat sarapan. Pagi itu jenazah korban langsung dibawa pulang pihak keluarga," ujar M Sholeh.

Lurah Desa Patalan Kecamatan Jetis Bantul, Sayudi, mengatakan meninggalnya warga penerima BST terjadi sekitar pukul 08.00. Pagi itu, Mardinah bersama warga

lain penerima BST antre mengambil BST dan korban tiba-tiba terjatuh dari kursi. Korban belum sempat mengambil BST, tapi sudah diwakilkan.

Peristiwa tersebut sempat membuat warga kebingungan khawatir terkait Covid-19. "Tapi warga dan pihak kepolisian membawa korban ke Puskesmas," ujar Sayudi.

Dijelaskan, penyaluran BST di Patalan berjalan lancar hingga pukul 11.00. Terdapat 259 penerima BST dari Kementerian Sosial tahap II dengan jumlah Rp 600.000/orang/bulan selama tiga bulan. (Roy)-f

ATURAN TRANSPORTASI DISEMPURNAKAN Umum dan Pribadi Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Regulasi pengganti Permenhub No 18/2020 ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada 8 Juni 2020.

"Menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Kemenhub menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (9/6).

Menhub menjelaskan, dengan dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi, akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi. Untuk itu Kemenhub melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan Permenhub 18/2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

"Pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena kami ber-

upaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat baik petugas transportasi maupun penumpang tetap bisa produktif, namun aman dari penularan Covid-19," jelasnya.

Secara umum ruang lingkup pengendalian transportasi yang dilakukan, untuk seluruh wilayah dan wilayah yang ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut, udara dan perkeretaapian.

Para penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi, para operator sarana dan prasarana transportasi wajib melakukan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk. Selain itu, diterapkan *physical distancing* (jaga jarak) mulai saat persiapan perjalanan,

selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan.

"Terkait pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi akan ditetapkan selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian di kemudian hari," ungkap Menhub.

Beberapa Surat Edaran Menhub mengenai pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut yaitu, SE Nomor 11/2020 untuk transportasi darat, SE Nomor 12/2020 untuk transportasi laut, SE Nomor 13/2020 untuk transportasi udara, dan SE Nomor 14/2020 untuk transportasi perkeretaapian.

Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada Permenhub 18/2020 maksimal 50 persen, pada Permennub 41/2020 akan diatur selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran. Misalnya, di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari total jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan. (Imd/Sim)-d

ADA TAMBAHAN DUA KASUS POSITIF Harus Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

YOGYA (KR) - Jumlah kasus positif virus Corona di DIY kembali bertambah lagi, yaitu tambah dua kasus, sehingga total menjadi 249 kasus. Untuk kesembuhan pasien positif Covid-19 bertambah 6 kasus, maka total menjadi 191 kasus. Selain itu, ada laporan satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal dunia, Selasa (9/6).

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Corona, Berty Murtiningsih, mengatakan, dua kasus tambahan terdiri ke-250 laki-laki (39) warga Bantul dengan riwayat perjalanan dari Jakarta dan kasus ke-251 Perempuan (34) warga Gunungkidul yang merupakan hasil *tracing* kontak kasus 243. Sedang enam kasus sembuh terdiri kasus ke-146 laki-laki (26) warga Bantul, kasus ke-175 laki-laki, (56) warga Gunungkidul, kasus ke-196 laki-laki (26) warga Sleman, kasus ke-201 perempuan (25) warga Sleman, kasus ke-227 perempuan (25) warga Sleman dan kasus ke-229 perempuan (36) warga Kota Yogyakarta. sedang PDP meninggal dalam proses laboratorium yang sudah di-swab yaitu perempuan (61) warga Bantul dengan riwayat penyakit kanker usus. Berty menjelaskan, total PDP di DIY telah mencapai 1.645

orang dengan 89 orang masih dalam perawatan serta total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 7.003 orang.

"Sebanyak 249 orang dinyatakan positif, 191 orang di antaranya sembuh dan 8 orang meninggal dunia serta 1.230 orang dinyatakan negatif dari hasil laboratorium. Terdapat 166 orang dengan 21 orang di antaranya meninggal dunia masih menunggu proses hasil uji laboratorium," imbuhnya.

Sekda DIY, Drs K Baskara Aji menyatakan, Pemda DIY terus berupaya mengurangi penyebaran dan penularan Covid-19. Namun semua upaya itu tidak akan bisa maksimal jika masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Seperti mulai banyaknya kerumunan yang terjadi di sejumlah titik dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, supaya penyebaran kasus di DIY bisa ditekan, pihaknya meminta agar masyarakat selalu disiplin dan menaati protokol kesehatan. "Kebanyakan kluster-kluster yang ada di DIY berasal dari luar daerah. Sebetulnya sejak awal munculnya kasus ini kami sudah berupaya untuk memperketat masuknya pendatang, termasuk dari zona merah," ungkap Baskara Aji. (Ira/Ria)-d

MUI-BNPB TEKEN MOU Libatkan Ulama Edukasi Normal Baru

JAKARTA (KR) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepakat bekerja sama menanggulangi Covid-19. Kerja sama itu tertuang dalam penandatanganan MoU bersama BNPB di Kantor MUI Jakarta Pusat, Selasa (9/5).

Nota kesepahaman ini ditandatangani Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo bersama Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi. Menurut Doni Monardo, MoU ini sangat penting untuk menghadapi Covid-19, apalagi saat ini sudah memasuki era kenormalan baru. "MoU ini sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk menghadapi Covid-19 ini," tuturnya.

Doni menjelaskan, bentuk kerja sama yang sangat diharapkan dari para ulama adalah bagaimana MUI lewat para ustaz dan dai maupun para pemuka agama di berbagai daerah bisa menyampaikan pesan tentang pentingnya protokol kesehatan. "Supaya masyarakat tahu, bahwa mengabaikan protokol kesehatan berisiko pada ancaman kesehatan," paparnya.

Menurut Kepala BNPB ini, untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19 ini, masyarakat perlu

memperbaiki perilakunya, lebih taat aturan dan lebih patuh kepada protokol kesehatan. Namun, menurut dia, protokol kesehatan ini terkadang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan.

Oleh karena itu, untuk menghadapi Covid-19, pihaknya menekankan pentingnya selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Ketiga bagian penting inilah yang harus kita lakukan selama Covid masih ada, selama wabah ini masih menjadi ancaman," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.

Doni menambahkan, melalui kerja sama dengan MUI diharapkan para ulama bisa menyampaikan pentingnya protokol kesehatan itu setiap saat, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal, seperti pesantren. Dengan demikian, masyarakat betul-betul bisa memahami, apalagi yang menyampaikan para ulama.

Ia yakin masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam sangat patuh dan taat terhadap para ulama. Semakin banyak tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan pesan pentingnya protokol kesehatan, sehingga bangsa ini semakin cepat mengatasi Covid-19. (Ati)-f

Kiai Muhyiddin Junaidi mengatakan, MUI merasa tersanjung telah diberikan kepercayaan BNPB untuk membantu memutuskan mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia. Dengan ditandatanganinya MoU ini, menurut dia, MUI memiliki beberapa kewajiban yang di antaranya menyiapkan materi khutbah atau ceramah untuk menghadapi Covid-19.

Muhyiddin menjelaskan, kewajiban MUI antara lain menyiapkan materi khutbah, ceramah dan tausiyah kepada masyarakat apabila dalam kondisi musibah harus memperbanyak bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah. Ke depannya MUI juga meminta saran BNPB untuk meningkatkan kedisiplinan umat Islam dalam menghadapi Covid-19. Ia juga berharap para ulama lebih disiplin lagi seperti halnya tentara dalam menghadapi pandemi tersebut.

Sekretaris Satgas Covid-19 MUI, KH Cholil Nafis, menjelaskan penandatanganan MoU antara MUI dan BNPB ini bertujuan mempererat hubungan untuk penanggulangan bencana. Kerja sama ini nantinya memprioritaskan penanggulangan pandemi Covid-19. Namun, MUI ke depannya juga akan membantu BNPB untuk menanggulangi bencana lainnya. (Ati)-d

TANTANGAN BARU KEMENDIKBUD Metode Pembelajaran di Era Pandemi

JAKARTA (KR) - Masa pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi tantangan bagi Kemendikbud. Oleh karena itu, metode pembelajaran baru di masa pandemi ini, hasilnya baru bisa dilihat dan dirasakan 10-15 tahun ke depan.

Mendikbud Nadiem mengatakan hal itu dalam diskusi virtual, Selasa (9/6). "Kita tidak bisa melihat *benefitnya* secara instan, *feedbacknya* baru 10-15 tahun ke depan, ini tantangan luar biasa," kata Nadiem.

Masa transisi akibat pandemi merupakan masa yang sulit dalam dunia pendidikan. Namun hal itu, kata Nadiem, bukan berarti tak ada kesempatan untuk memperbaiki pendidikan. Pada masa transisi ini, ia melihat banyak orangtua, guru maupun murid mencoba metode pembelajaran baru menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nadiem melihat kondisi ini sebagai investasi kemampuan individu di bidang teknologi. "Jadi walaupun kualitas pembelajaran terkorbankan, tetapi investasi untuk *technology adaption* sedang terjadi," ujarnya.

Menurut Mendikbud, kondisi masyarakat yang saat ini sedang beradaptasi dengan metode belajar baru dapat menjadi keuntungan di masa depan. Sebab metode yang hari ini digunakan bisa diadopsi di masa depan. "Jadi ada *trade off* dimana ada pengorbanan kualitas, tapi kita *benefitnya* ada untuk adaptasi atau adopsi dalam teknologi pembelajaran ke depan," jelasnya.

Institusi pendidikan harus berinovasi dan berani bereksperimen demi menciptakan generasi baru yang mandiri dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Dengan demikian, institusi pendidikan harus berani bereksperimen untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif. (Ati)-f

KASUS SUAP DI MA 2011-2016 KPK Dalami Aliran Sejumlah Uang

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016. Penyidik KPK mengonfirmasi saksi Yoga Dwi Hartiyo yang merupakan kakak ipar dari tersangka Rezky Herbiyong (RHE) perihal dugaan aliran uang.

"Penyidik mengonfirmasi dugaan adanya aliran sejumlah uang dari tersangka RHE kepada saksi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/6).

Seperti diketahui, Rezky merupakan menantu Nurhadi atau pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di MA tahun 2011-2016. Yoga, Senin (8/6) telah diperiksa penyidik KPK dalam kasus tersebut.

Jubir KPK Ali Fikri menyebutkan, selain Yoga, KPK pada hari yang sama juga memeriksa saksi Asep Adeng Sundana. Saksi ini merupakan panitera muda perdata dalam penyidikan kasus tersebut untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Sosenjo (HSO). "Pemeriksaan terhadap Asep Adang, penyidik mendalam mengenai pengetahuan saksi soal adanya pendaftaran perkara oleh tersangka HSO di PN Jakarta Utara," jelas Ali.

Sementara itu, tersangka lainnya, Hiendra saat ini masih menjadi buronan KPK setelah ditetapkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020. Untuk tersangka Nurhadi dan Rezky telah ditangkap tim KPK, Senin (1/6). (Ful)-d

JADI SALAH SATU JUBIR GUGUS COVID-19 Kejutan dari Munculnya Dokter Reisa

PUBLIK dikejutkan dengan munculnya dr Reisa Broto Asmoro dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan dan Penangan Covid-19. Ternyata, dokter cantik yang selama ini menjadi host program kesehatan dr OZ di salah satu televisi swasta tersebut, kini menjadi salah satu jubirnya.

Munculnya dr Reisa ini, seakan mengimbangi kehebohan berita pecah rekornya penambahan pasien positif Covid-19 yang melewati 1.000 kasus. Sehingga sempat menjadi trading topik di media sosial. Dokter Reisa tergabung dalam Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Dari jejak kariernya, dr Reisa Broto Asmoro merupakan finalis Puteri Indonesia 2010, ia berhasil menduduki juara kedua. Reisa kala itu mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia merupakan lulusan fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan.

Dalam tugas barunya ini, ia akan lebih banyak memberikan penjelasan umum terkait perkembangan Covid-19. Sedangkan jubir Achmad Yuriyanto hanya mengumumkan jumlah kasus terkini terkait Covid-19 di Indonesia, baik kasus tersebut, meninggal, positif maupun jumlah tes harian.

(Jon)-d



KR-Instagram

Reisa Broto Asmoro